



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT UTAMA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832362 FAKSIMILI (021) 3832363

Nomor : **B/3392/03/18/01/SET** Jakarta, **21** September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Informasi Mengenai Pengumuman Seleksi PPPK Lemhannas RI T.A. 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Dekan Fakultas
3. Kepala Pusat Karir

di

tempat

1. Berdasarkan Pengumuman Nomor: PENG/28/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pendaftaran Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023.
2. Sesuai hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa Lemhannas RI saat ini sedang membuka kesempatan bagi para lulusan Diploma III, Diploma IV, dan Strata I yang memenuhi persyaratan untuk bergabung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lemhannas RI. Mohon berkenan Bapak/Ibu untuk menyampaikannya kepada Pusat Karir di Perguruan Tinggi atau dapat disampaikan pada alumni.
3. Persyaratan dan ketentuan terkait Seleksi PPPK di Lemhannas RI tercantum pada lampiran surat.
4. Proses pendaftaran Seleksi PPPK menggunakan sistem *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Atas bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Utama
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Kepala Biro Umum,



Drs. Wibowo, M.H.
Brigadir Jenderal Polisi

Tembusan:

- Sekretaris Utama Lemhannas RI.

DAFTAR NAMA TUJUAN PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI
1.	Universitas Utpadaka Swastika
2.	Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
3.	Program Vokasi Universitas Indonesia
4.	Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
5.	Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang
6.	Universitas Widyatama
7.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
8.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
9.	Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara
10.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
11.	Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
12.	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim
13.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu
14.	Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
15.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
16.	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjajaran
17.	Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
18.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
19.	Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
20.	Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
21.	Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya
22.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
23.	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
24.	Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Udayana
25.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura
26.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura
27.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado
28.	Universitas Muhammadiyah Semarang
29.	Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara
30.	Fakultas Matematika dan Ilmi Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang
31.	Fakultas Matematika dan Ilmi Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang
32.	Institut Bisnis dan Multimedia (IBM) Asmi
33.	Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
34.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
35.	Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
36.	Program Vokasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM
37.	Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM
38.	Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta
39.	Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung
40.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang
41.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun
42.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali
43.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Kupang
44.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI
45.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin
46.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Nunukan
47.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado
48.	Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang
49.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akademi Sekretari Dan Manajemen Mataram
50.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Aan
51.	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Surabaya
52.	Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Kencana Bandung
53.	Akademi Sekretari & Manajemen Dharma Budhi Bhakti
54.	Akademi Sekretari Budi Luhur
55.	Akademi Sekretari Saint Theresa
56.	Akademi Sekretari Interstudi
57.	Akademi Sekretari Manajemen Indonesia Klabat
58.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Ariyanti
59.	Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya
60.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco
61.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Insulindo
62.	Akademi Sekretari Manajemen Taruna Bakti
63.	Akademi Sekretari Manajemen Indonesia LPI Makassar
64.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Jayapura
65.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Padang
66.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Industri Budhi
67.	Akademi Sekretari Manajemen Cendana
68.	Akademi Sekretari Interstudi
69.	Akademi Sekretari Manajemen Nusantara
70.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Mataram
71.	Akademi Sekretari Manajemen Amsir Pare-Pare
72.	Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya
73.	Akademi Sekretari Manajemen Indonesia Publik
74.	Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria
75.	Akademi Sekretari Dan Manajemen Sriwijaya
76.	Akademi Sekretari Dan Manajemen BSI Jakarta
77.	Akademi Sekretari Dan Manajemen BSI Bandung
78.	Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
79.	Akademi Sekretari Manajemen Nusantara
80.	Akademi Manajemen Belitung
81.	Akademi Manajemen Bumi Sebalu Bengkayang
82.	Akademi Manajemen Indonesia Semarang
83.	Akademi Manajemen Kesatuan Bogor
84.	Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT UTAMA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832382 FAKSIMILE (021) 3847749

PENGUMUMAN

NOMOR: PENG/28/IX/2023

TENTANG

PENDAFTARAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat, maka Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

I. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Alokasi Formasi dan Rentang Penghasilan

A. Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Alokasi Formasi

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia membuka alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian:

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Unit Kerja Penempatan	Jenis Formasi
1	2	3	4	5	6
1.	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Manajemen Logistik/ D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik	1	Sekretariat Utama, Biro Umum, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan	Umum
2.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	D-III Manajemen Sumber Daya Manusia/ D-III Administrasi Publik/ D-III Administrasi Negara	1	Sekretariat Utama, Biro Umum	Umum
3.	Terampil - Pranata Komputer	D-III Sistem Informasi/ D-III Teknik Komputer/ D-III Teknik Informatika/ D-III Teknologi Komputer/ D-III Teknologi Informasi	1	Sekretariat Utama, Biro Telematika	Umum

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Unit Kerja Penempatan	Jenis Formasi
1	2	3	4	5	6
4.	Terampil - Asisten Perpustakaan	D-III Perpustakaan/ D-III Ilmu Perpustakaan	1	Sekretariat Utama, Biro Hubungan Masyarakat	Umum
5.	Terampil - Asisten Statistisi	D-III Statistika	1	Pusat Laboratorium	Umum
6.	Terampil - Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	1	Sekretariat Utama, Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah	Umum - Disabilitas
7.	Terampil - Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	12	Sekretariat Utama: <ul style="list-style-type: none"> - Biro Perencanaan, Subbagian Tata Usaha Biro; - Biro Umum, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Subbagian Tata Usaha Biro dan Pengamanan; - Biro Telematika, Subbagian Tata Usaha Biro; - Biro Kerja Sama dan Hukum, Subbagian Tata Usaha Biro; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Protokol; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan 	Umum

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Unit Kerja Penempatan	Jenis Formasi
1	2	3	4	5	6
				Tenaga Profesional; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian Strategik; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional; - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Biro;	

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Unit Kerja Penempatan	Jenis Formasi
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> - Biro Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama 	
8.	Terampil - Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	1	Inspektorat, Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Umum
9.	Terampil - Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	4	Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional: <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Operasional Pendidikan; - Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan; - Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan; - Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan 	Umum
10.	Terampil – Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	5	Deputy Bidang Pengkajian Strategik: <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Program Pengembangan Pengkajian; - Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi; - Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam; 	Umum

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Unit Kerja Penempatan	Jenis Formasi
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none">- Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi;- Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik	
11.	Terampil – Arsiparis	D-III Manajemen/ D-III Kearsipan/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Sekretaris	4	Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: <ul style="list-style-type: none">- Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;- Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;- Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan;- Direktorat Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Umum

B. Rentang Penghasilan

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN
1.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 7.300.000 s.d. Rp 8.500.000
2.	Terampil – Arsiparis	Rp 6.000.000 s.d. Rp 7.000.000
3.	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp 6.000.000 s.d. Rp 7.000.000
4.	Terampil – Pranata Komputer	Rp 6.000.000 s.d. Rp 7.000.000
5.	Terampil – Asisten Perpustakaan	Rp 5.700.000 s.d. Rp 6.800.000
6.	Terampil – Asisten Statistisi	Rp 5.700.000 s.d. Rp 6.800.000

II. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Lemhannas RI T.A. 2023 sebagai berikut:

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
2.	Terampil – Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
3.	Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
4.	Terampil – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi.
5.	Terampil – Asisten Perpustakaan	Melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan.
6.	Terampil – Asisten Statistisi	Melaksanakan teknis kegiatan statistik.

III. INFORMASI UMUM

1. Pendaftaran mulai tanggal 20 September 2023;
2. Pendaftaran menggunakan sistem *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan di 1 (satu) instansi sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun 0 (nol) hari pada saat mendaftar;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak pernah melakukan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi CASN sebelumnya;
6. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
7. Tidak ...

7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, dan Anggota Polri;
8. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:

- a. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dan transkrip nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri dengan program studi yang **terakreditasi minimal B (Baik)** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta IPK minimal sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	IPK MINIMAL
D-III	2,75 dari skala 4,00
S-1/D-IV	2,75 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan transkrip nilai asli serta Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kemdikbudristek.
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 12. Wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 13. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK Lemhannas RI T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan dengan jenis formasi umum – disabilitas sesuai tabel Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jumlah Alokasi Formasi sebagaimana tercantum pada romawi I huruf A;
 - b. Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah minimal setingkat RSUD yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 14. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah minimal setingkat RSUD sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - b. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba **yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK**;
 15. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 16. Bersedia mengabdikan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan tidak mengundurkan diri selama terikat perjanjian kerja sebagai PPPK Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

17. Tidak ...

17. Tidak bertindik (bagi laki-laki) dan tidak bertato, kecuali dalam hal keagamaan atau adat istiadat;
18. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Resort Kota/Kota Besar **yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK.**

B. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Lemhannas RI T.A. 2023 meliputi:

1. Jabatan **Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** diutamakan:
 - a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1; dan
 - b. Wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait.
2. Jabatan **Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur** wajib memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan sumber daya manusia selama 2 (dua) tahun.
3. Jabatan **Terampil – Pranata Komputer** diutamakan:
 - a. Memiliki kemampuan dasar pemrograman, baik *front-end* maupun *back-end*;
 - b. Memiliki pemahaman tentang konsep *Restful API*;
 - c. Memiliki kemampuan dasar pengoperasian OS; dan
 - d. Wajib memiliki pengalaman kerja di bidang pembuatan ataupun pengembangan *website/mobile application* selama 2 (dua) tahun.
4. Jabatan **Terampil – Asisten Perpustakaan** diutamakan:
 - a. Menguasai kegiatan *shelving* bahan perpustakaan;
 - b. Memiliki kemampuan promosi perpustakaan berbasis digital; dan
 - c. Melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan; dan
 - d. Wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan/bidang terkait pengelolaan perpustakaan/pelayanan perpustakaan/pengembangan sistem kepastakawanan.
5. Jabatan **Terampil – Asisten Statistisi** wajib memiliki pengalaman kerja di bidang pengolahan data selama 2 (dua) tahun.
6. Jabatan **Terampil – Arsiparis** wajib memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan arsip dinamis selama 2 (dua) tahun.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat *e-mail* yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK Lemhannas RI;
2. Pelamar harus melakukan pendaftaran secara *online* di portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal tersebut;
3. Pelamar melakukan pendaftaran secara *online* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
4. Bagi pelamar penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
5. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
6. Pelamar memilih instansi “Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia” dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;

7. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
 - b. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) berwarna atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - c. *Scan* Ijazah asli:
 - 1) Untuk pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri, wajib melampirkan ijazah asli;
 - 2) Untuk pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri, melampirkan ijazah asli, surat keputusan penyetaraan ijazah asli yang dikeluarkan dari Kemdikbudristek dalam 1 (satu) *file* pdf.
 - d. *Scan* surat/sertifikat akreditasi program pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN-PT bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan dari Kemendikbudristek bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri;
 - e. *Scan* transkrip nilai asli dengan minimal IPK yang tertera pada romawi IV huruf A angka 10 (bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai asli serta Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kemdikbudristek);
 - f. *Scan* surat keterangan pengalaman kerja asli paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada romawi IV huruf A nomor 12;
 - g. *Scan* surat lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam pada kertas ukuran F4 ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI di Jakarta dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp 10.000 (format terlampir);
 - h. *Scan* surat pernyataan 18 poin diketik menggunakan komputer dengan tinta hitam pada kertas ukuran F4 yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000 (format terlampir);
 - i. *Scan* surat pernyataan 5 poin diketik menggunakan komputer dengan tinta hitam pada kertas ukuran F4 yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000 (format terlampir);
 - j. *Scan* sertifikat yang relevan dengan jabatan yang dilamar, digabung dalam 1 (satu) *file* pdf dan diunggah pada menu sertifikat; dan
 - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah minimal setingkat RSUD yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada romawi IV huruf A nomor 13.
8. Pelamar melakukan unggah dokumen pelamaran sebagaimana tersebut angka 7 (tujuh) huruf a sampai dengan huruf k pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
9. Pelamar wajib menggunakan e-meterai pada dokumen surat lamaran, surat pernyataan 18 poin, dan surat pernyataan 5 poin. Penempatan e-meterai pada dokumen tidak boleh menutupi tulisan maupun tanda tangan. E-meterai wajib dibeli pada portal <https://meterai-elektronik.com> atau dapat dibeli saat mengakses portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada proses pendaftaran. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/tutorialemeterai>;
10. Spesifikasi dokumen yang diunggah:
 - a. Dokumen dalam bentuk gambar hasil *scan* berwarna dari dokumen asli;
 - b. Ekstensi dokumen adalah: *.jpg / *.jpeg / *.pdf;
 - c. Setiap dokumen harus terlihat dan atau terbaca secara jelas.

11. Pelamar yang tidak mengirimkan dokumen secara lengkap, tidak terbaca secara jelas, dan/atau tidak sesuai spesifikasi/persyaratan, dan/atau mengirimkan dokumen palsu, maka akan dinyatakan gugur atau tidak diproses.

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi dokumen persyaratan unggah.
2. Seleksi Kompetensi (SK) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) hanya untuk Jabatan Fungsional Terampil - Pranata Komputer berupa studi kasus dan wawancara.

VII. PENENTUAN KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi:
 - a. Pelamar yang akan dipanggil untuk mengikuti Seleksi Kompetensi (SK) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan akan diumumkan melalui website Lemhannas RI, www.lemhannas.go.id;
 - b. Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui website Lemhannas RI dinyatakan sebagai surat panggilan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi (SK) dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
 - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari website <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi:
 - a. Kelulusan seleksi kompetensi menggunakan CAT didasarkan pada Nilai Ambang Batas (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - b. Bobot penilaian Seleksi Kompetensi menggunakan CAT adalah:
 - 1) Bagi Formasi Jabatan Fungsional Terampil - Pranata Komputer sebesar 80%; dan
 - 2) Bagi Formasi Jabatan selain Jabatan Fungsional Terampil - Pranata Komputer sebesar 100%.
 - c. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan tidak ada Nilai Ambang Batas dan bersifat tidak menggugurkan.
 - d. Bobot penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Jabatan Fungsional Terampil - Pranata Komputer sebesar 20%.
3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

VIII. LOKASI DAN JADWAL SELEKSI

1. Seleksi Kompetensi Teknis (CAT) dilaksanakan di 19 (sembilan belas) kota di seluruh Indonesia. Pelamar dapat memilih lokasi tes yang terdekat dengan domisili (titik lokasi tes tercantum pada lampiran).
2. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Jabatan Fungsional Terampil - Pranata Komputer dilaksanakan secara daring dengan waktu pelaksanaan akan diinformasikan kemudian.
3. Penjadwalan bersifat **tentatif** dan seluruh tahapan seleksi tercantum dalam lampiran.

IX. KETENTUAN ...

IX. KETENTUAN LAIN

1. Lemhannas RI tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah, sehingga semua pelamar yang lulus seleksi akhir akan ditempatkan di Kantor Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat 10110. Penempatan pada unit kerja sesuai jabatan yang dilamar, kecuali jika unit kerja mengalami restrukturisasi atau ada kebutuhan mendesak maka dapat dipindahkan ke unit kerja lain di lingkungan Lemhannas RI;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
3. Berdasarkan kebijakan Panselnas, pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai untuk melengkapi dokumen persyaratan, namun wajib menggunakan e-meterai. Penggunaan e-meterai harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemui dokumen menggunakan meterai (bukan e-meterai) atau yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka akan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
4. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah minimal setingkat RSUD yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Lemhannas RI dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
6. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK di Lemhannas RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Seleksi Instansi serta telah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK dari BKN kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada pengadaan ASN di seluruh instansi untuk periode selanjutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu pelamar mengundurkan diri;
9. Apabila dalam pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Lemhannas RI dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
10. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;

11. Keputusan Panitia Seleksi Instansi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Pelayanan, penjelasan informasi, dan pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Lemhannas RI Tahun 2023 hanya melalui:
 - a. Website : <https://www.lemhannas.go.id/>
 - b. Email : recruitment.lemhannas@gmail.com
 - c. Telegram : <https://t.me/rekrutmenpppklemhannas2023>
 - d. Google Drive: <https://bit.ly/pppklemhannas2023>
 - e. Instagram : https://www.instagram.com/lemhannas_ri/

Jakarta, 15 September 2023



Sekretaris Utama
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2023,

Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.
Inspektur Jenderal Polisi

**Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA KANTOR REGIONAL/ UNIT PELAYANAN TEKNIS	ALAMAT
1	2	3
1.	Kanreg I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta
2.	Kanreg II BKN Surabaya	Jl. Let. Jend. S. Parman No.6, Waru, Sidoarjo
3.	Kanreg III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Bandung
4.	Kanreg IV BKN Makassar	Jl. Pacerakkang No.3 Km. 14, Daya, Makassar
5.	Kanreg V BKN Jakarta / BKN Pusat	Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur / Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6.	Kanreg VI BKN Medan	Jl. T.B. Simatupang No.124, Pinang Baris, Sunggal, Medan
7.	Kanreg VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang
8.	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjarbaru
9.	Kanreg X BKN Denpasar	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar
10.	Kanreg XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado
11.	Kanreg XIII BKN Aceh	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Km.11 No.113 Gp. Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar
12.	UPT BKN Batam	Gedung Bersama Pemko, Belian, Kota Batam
13.	UPT BKN Pontianak	Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak
14.	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang
15.	UPT BKN Padang	Jl. Rimbo Kaluang No.52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang
16.	UPT BKN Balikpapan	Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
17.	UPT BKN Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari
18.	UPT BKN Mataram	Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram
19.	UPT BKN Kupang	Jl. Frans Seda, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jadwal Pelaksanaan Seleksi
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2023

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*
1	2	3
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari 2023 s.d. 11 Februari 2024

*Catatan:

- Jadwal bersifat tentatif, jadwal akan mengikuti keputusan KemenPANRB dan BKN.

Format Surat Lamaran

Yth. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan yang Dilamar :
Unit Kerja yang Dilamar :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Domisili :
Nomor Telp./Handphone :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lemhannas RI Tahun 2023. Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat lamaran ditulis tangan dengan pena bertinta hitam pada kertas ukuran F4 ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI di Jakarta dan ditandatangani serta dibubuhi e-meterai Rp 10.000.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berwarna atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
3. Pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
4. Ijazah asli dan transkrip nilai asli dengan IPK sesuai kriteria bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri*);
5. Ijazah asli dan transkrip nilai asli serta Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri yang sesuai kriteria*);
6. Surat pernyataan 18 poin diketik menggunakan komputer dengan tinta hitam pada kertas ukuran F4 yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000;
7. Surat pernyataan 5 poin diketik menggunakan komputer dengan tinta hitam pada kertas ukuran F4 yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000;
8. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyertakan*):
 - a. Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah minimal setingkat RSUD yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
9. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan.

Seluruh dokumen persyaratan tersebut telah saya unggah melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>. Demikian surat lamaran ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK di lingkungan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., 2023



(ttd)

(Nama Pelamar)

*) Hapus nomor yang tidak sesuai persyaratan.

Format Surat Pernyataan 18 poin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan yang Dilamar :
Unit Kerja yang Dilamar :
Alamat Sesuai KTP :
Alamat Domisili :
Nomor Telp./Handphone :

Merupakan pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lembaga Ketahanan Nasional RI, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki Karakteristik Pribadi selaku penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak pernah melakukan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi CASN sebelumnya;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CASN yang sedang dalam proses pengusulan NIP/NI PPPK;
8. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, dan Anggota Polri;
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
10. Memiliki jenjang pendidikan dan program studi dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
11. Sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental;
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
13. Tidak bertindik (bagi laki-laki) dan tidak bertato, kecuali dalam hal keagamaan atau adat istiadat;
14. Dalam lamaran ini memberikan data dan dokumen yang benar dan sah;
15. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NI PPPK adalah benar bukan palsu;
17. Bersedia mengabdikan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan tidak mengundurkan diri selama terikat perjanjian kerja sebagai PPPK Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
18. Menyandang disabilitas dan mampu melakukan hal-hal sesuai dan/atau sama dengan kriteria pada pengumuman*).

Apabila salah satu pernyataan pada angka di atas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau digagalkan kelulusan akhir saya atau tidak diproses penetapan NI PPPK atau dibatalkan keputusan pengangkatan PPPK.

....., 2023
Yang membuat pernyataan,



(ttd)

(NamaPelamar)

*) Hapus nomor yang tidak sesuai persyaratan.

Format Surat Pernyataan 5 Poin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- 1. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, dan Anggota Polri;
- 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2023
Yang membuat pernyataan,



(ttd)

(NamaPelamar)